



FISIP

Kedepankan Proses Dialogis



I. Basis Susilo

Ada perubahan nama uang kuliah. Selama ini namanya SPP (Sumbangan Peningkatan Pendidikan). Mulai tahun akademik 2009/2010 nanti, namanya SOP (Sumbangan Operasional Pendidikan). Soal nama berganti tentunya tidak ada persoalan. Yang menjadi persoalan adalah adanya jumlah yang harus dibayarkan. Selama ini sejak 2000/2001, SPP mahasiswa SPMB dan PMDK Prestasi adalah Rp 600.000,- (untuk bidang Sosial) dan Rp 700.000,- (untuk bidang Eksakta). Jadi sudah sembilan tahun tidak ada

penyesuaian.

Direncanakan, SOP untuk mahasiswa eksakta Rp 1.250.000,-. SOP untuk mahasiswa bidang Sosial ada yang Rp 1.000.000,- dan Rp 800.000,-. Mahasiswa FH, FE, dan Fakultas Psikologi angkatan 2009/2010 akan jadi Rp 1.000.000,-. Sedangkan untuk mahasiswa FISIP dan FIB angkatan 2009/2010 adalah Rp 800.000,-. Untuk angkatan sebelum 2009/2010 tetap Rp 600.000,-

Sebelum menyesuaikan angka itu Rektor mengajak bicara para pimpinan universitas lainnya dan fakultas dan perwakilan mahasiswa. Para pimpinan umumnya bisa memahami penetapan angka baru itu. Terutama karena memang sudah sangat lama tidak ada penyesuaian, karena penetapan SOP itu sudah dipersiapkan cukup lama. Senat Akademik Universitas memutuskan pada Rapat Pleno 10 April 2008. Majelis Wali Amanat memutuskan pada 6 Oktober 2008). Juga karena perbedaan masih wajar dan pantas, yaitu Rp 200.000,-. Apalagi dibanding PTN-PTN lain, SPP di Unair masih amat sedikit. Misalnya, di ITS

Rp 1.250.000,-.

Perwakilan mahasiswa secara kritis mempertanyakan alasan-alasan penetapan angka baru. Ada yang tidak bisa menerima. Ada yang belum menerima. Ada yang bisa memahaminya dengan beberapa syarat. Perwakilan mahasiswa FISIP termasuk yang paling kritis menyikapi rencana angka SOP itu, dan belum menerima rencana itu.

Kita bisa memahami semua aspirasi itu. Kita menghargai adanya perbedaan pandangan. Kita ingin agar semua aspirasi itu bisa tersalurkan secara bijaksana dan bermartabat, tanpa harus eksekutif. Kita perlu bersyukur karena saluran itu masih tersedia di kampus ini, sehingga aspirasi-aspirasi tidak harus disampaikan melalui cara-cara kekerasan yang merugikan masyarakat dan mengganggu citra universitas kita. Semua itu merupakan bagian dari proses pembuatan keputusan. Sah-sah saja menuntut dan menawar selama belum ada keputusan final. Kita mesti menerima kalau sudah diputuskan oleh pimpinan. (*)

I SURAT PEMBACA

- I “.. Ide Bagus. Dari dulu saya ingin ada ruang publik antara dosen dan mahasiswa. Semoga untuk edisi-edisi berikutnya ada rubrik sesi-sesi curhat mahasiswa. Saya rasa itu penting untuk ditambahkan selama masih dalam batasan koridornya.” (*Asti, HIMA Sosiologi*)
- I “... Saya sangat mendukung adanya buletin ini. Minimal bisa menjembatani antara dekanat dan mahasiswa. Men-support kreativitas di akademik. Memantau aktifitas fakultas serta dosen. Dan yang paling penting bisa jadi sarana *uneg-uneg* bagi masyarakat kampus.”
(*Suyono, KASUB Umum Sarana Pra Sarana*)
- I “... Awal yang baik dari keterbukaan, Saran saya ditambahkan rubrik yang memuat *feedback* dari mahasiswa mengenai hal-hal yang terjadi di FISIP.” (*Firman Nur, HIMA Komunikasi*)
- I “... Selamat atas terbitnya Jendela, Semoga dengan adanya media ini, kita jadi banyak tau apa saja kegiatan-kegiatan yang ada di FISIP. Tidak hanya itu, Saya berharap media ini dapat menjadi sarana aspirasi mahasiswa juga..” (*Erik Stenly, Departemen MINBAK BEM FISIP*)

I AGENDA FISIP

Waktu	Agenda	Penyelenggara	Tempat
30 Maret - 8 April	Liga Paving	BEM FISIP Unair	Lap. Parkir FIB
24 Maret - 10 April	HI CUP	Hima HI	Lap. Parkir FIB
6 April	Seminar QUEER : LGBT dalam Bingkai Media	Hima Komunikasi	Ruang Adi Sukadana
7 April	Pemutaran Film: LGBT dalam Bingkai Media	Hima Komunikasi	Ruang Adi Sukadana
17 April	International Relation English Fun Fair (IREFF)	Hima HI	- Gd.A Lt.3 - Aula - Gd.C Lt.3
27 April	Kunjungan SMA	KaDep HI	Ruang Adi Sukadana
28 April	LKTI SMA	Hima Sosiologi	Ruang Adi Sukadana
Rabu Minggu I & III	Diskusi Reboan	Dekanat Fisip Unair	Ruang Adi Sukadana

PENGABDIAN MASYARAKAT

Seminar Gender bagi guru SMP, SMA / SMK, pada: Hari / Tanggal : Rabu-Kamis / 1-2 April 2009 Tempat : Gedung Pertemuan SMK 5 & 4 April 2009, Pembicara : Dra. Tri Susantari, M.Si, Sri Endah Nurhidayati, S.Sos., M.Si., Novianto Edi Suharno, SST. Par. M. Si.
Leadership Sensivity Training di Pemda Provinsi Maluku, pada: Hari / Tanggal : Senin-Rabu / 23-25 Maret 2009 Fasilitator : Drs. Yan Yan Cahyana
Pertemuan Jaringan Anti Trafiking (JIMAT) Kabupaten Cirebon dan Satuan Gugus Tugas Anti Trafficking (Santri), pada: Hari / Tanggal : Kamis / 19 Maret 2009 Tempat : Ruang Paseban Pemda Kabupaten Cirebon, Sunan Drajat, Sumbar Fasilitator : Drs. Bambang Budiono
Seminar Evaluasi Lima Tahun Pemerintahan SBY yang akan diselenggarakan pada: Hari / Tanggal : Selasa / 31 Maret 2009 Pukul : 08.00-13.00 Tempat : Aula Lantai 3 Gedung C FISIP Unair Pengurus Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik FISIP Unair mengundang Drs. I Basis Susilo, MA. Untuk memberikan sambutan pada pembukaan acara seminar tersebut.

STAF PENGAJAR STUDI LANJUT PROGRAM S2 / S3 FISIP - UNAIR

Departemen Sosiologi

No.	Nama	Universitas	Jenjang Pend.
1.	Drs. Doddy Sumbodo Singgih, M.Si	Univ. Gadjah Mada Yogyakarta	S3
2.	Drs. Eddy Hery Prihantoro, M.Si.	Universitas Airlangga Surabaya	S3
3.	Dra. Tuti Budirahayu, M.Si.	Univ. Gadjah Mada Yogyakarta	S3

Departemen Politik

No.	Nama	Universitas	Jenjang Pend.
1.	Drs. Moch. Asfar, M.Si.	Universitas Airlangga Surabaya	S3
2.	Drs. Kris Nugroho, MA	Universitas Airlangga Surabaya	S3
3.	Dra. Dwi Windyastuti, B.H., MA	Univ. Gadjah Mada Yogyakarta	S3
4.	Dra. Siti Aminah, MA.	Universitas Indonesia Jakarta	S3

Departemen Administrasi Negara

No.	Nama	Universitas	Jenjang Pend.
1.	Drs. Antun Mardianto, MA	Universitas Brawijaya Malang	S3
2.	Sulikhah Asmorowati, S.Sos., M.DevSt.	Melbourne University Australia	S3

Departemen Antropologi

No.	Nama	Universitas	Jenjang Pend.
1.	Dra. Pinky S.W., MA.	Universitas Indonesia Jakarta	S3
2.	Drs. Yusuf Ernawan, M.Hum	Univ. Gadjah Mada Yogyakarta	S3
3.	Drs. Bambang Budiono Mulyo S.	Universitas Indonesia Jakarta	S2
4.	Dra. Retno Andriati, MA.	Univ. Gadjah Mada Yogyakarta	S3
5.	Rustinsyah, Dra., M.Si.	Univ. Gadjah Mada Yogyakarta	S3
6.	Dra. Lucy Diah H, S.Sos., M.Kes.	Universitas Airlangga Surabaya	S3

Departemen Hubungan Internasional

No.	Nama	Universitas	Jenjang Pend.
1.	M. Muttaqien, S.IP.	Flinders Univ, Australia	S3
2.	Moch. Yunus, S.IP.	Univ. Gadjah Mada Yogyakarta	S2
3.	Irfa Puspitasari, S.IP.	Jawaharlal Nehru Univ, India	S2
4.	I Gede Wahyu Wicaksana, S.IP., M.Si.	University of Western Australia, Australia	S3

Departemen IIP

No.	Nama	Universitas	Jenjang Pend.
1.	Dra. Endang Gunarti	Univ. Padjajaran Bandung	S2
2.	Dra. Rahma Sugihartati	Universitas Airlangga Surabaya	S2
3.	Dra. Tri Susantari, M.Si	Universitas Airlangga Surabaya	S3
4.	Imam Yuadi, S.Sos.	ITS Surabaya	S2
5.	Endang Fitriyah Mannan, S.Sos.	Universitas Indonesia Jakarta	S2
6.	Henni Endah Wahanani, ST.	ITS Surabaya	S2
7.	Dessy Harisanty, S.Sos.	Univ. Gadjah Mada Yogyakarta	S2
8.	Johny Alfian K, S.Sos., M.Si.	Leiden - Belanda	S2

Departemen D3 Pariwisata

No.	Nama	Universitas	Jenjang Pend.
1.	Sri Endah Nurhidayati, S.Sos., M.Si.	Univ. Gadjah Mada Yogyakarta	S3
2.	Dian Yulie Reindrawati, S.Sos., MM.	University of Newcastle Australia	S3

Departemen Komunikasi

No.	Nama	Universitas	Jenjang Pend.
1.	Drs. Henri Subiakto, SH., M.Si.	Universitas Airlangga Surabaya	S3
2.	Dina Septiani, B.Comm.	The Hague Univ. The Netherlands	S3
3.	Sri Wijayanti, S.Sos.	Univ. Gadjah Mada Yogyakarta	S3

I PENANGGUNG JAWAB: I. Basis Susilo (Dekan FISIP)

I PIMPINAN UMUM: V. Dugis (Wakil Dekan III) I PIMPINAN REDAKSI: Yayan Sakti Suryandaru

I JURNALIS: Debrina Tedjawidjaja ; Intan Fitranisa ; Putri Rizky Pramadhani ; Muhammad Zaki Ath.T ; Arfa Darojati

I LAY-OUT/PRODUKSI: Irfan Wahyudi, S.Sos

I Alamat Redaksi: Gedung FISIP Kampus B Universitas Airlangga Jl. Dharmawangsa Dalam Surabaya

Telp. (031) 5011744, 5012442, 5017429, 5034015. Fax. (031) 5047754 I e-mail: fisip@unair.ac.id

Seminar Dekriminalisasi Kebebasan Pers dan Ekspresi; Mozaik Sejarah Pers Indonesia

Matinya Kebebasan Pers



Dra. Rachmah Ida, M.Comm saat memberikan materi seminar

Pertama, pers sebagai institusi mengalami proses yang tidak mudah. Ketika panji-panji kekuasaan Soeharto masih tegak, pembredelan terjadi di mana-mana. Pascareformasi, masalah tak lantas surut. Pers menjadi rentan terhadap undang-undang negara karena banyak peraturan bikin pemerintah yang mengancam. “Jerat-jerat hukum seharusnya direvisi,” kata Rachma Ida.

Kedua, munculnya *communal censorship* sebagai penyensoran jenis baru selama satu dekade terakhir ini. Setelah sekian lama terendam keganasan orde baru, tekanan banyak datang dari *interest groups* seperti organisasi agama, masyarakat adat, dan sebagainya. Yang juga sangat dominan tentu saja adalah *ownership censorship*. Pemilik dengan latar belakang dan kepentingannya masing-masing seringkali melakukan penyensoran terhadap medianya sendiri. Akibatnya, wartawan semakin terkekang dalam memproduksi berita. “Bagaimana masyarakat sipil bisa tahu berita yang faktual dengan model-model baru penyensoran seperti ini?” imbuh pakar media ini.

Rachma Ida juga mengupas hak jawab, kompensasi bagi institusi pers, serta jurnalis itu sendiri. Menurutnya, hak ekonomi dan politik institusi pers seringkali diabaikan. Padahal, mereka selalu mendapat banyak tekanan dan tuntutan. “Ini harus diperjuangkan dan disikiskan dalam ruang public,” lanjutnya.

Saat ini, profesi jurnalis mengalami degradasi di mata masyarakat. Orang begitu mudah menjadi jurnalis. Bahkan, penyakit-penyakit menular sebagai jurnalis dilakukan tidak hanya oleh individu tetapi juga lembaga maupun organisasi profesi. Sudah saatnya dibuatkan standarisasi profesi jurnalis, termasuk masalah upah dan pendirian media. Demikian disampaikan Drs. Yayan Sakti Suryandaru, M.Si.

Dosen Komunikasi Unair ini juga menjelaskan, kekerasan terhadap media bisa dilakukan oleh banyak pihak. Tidak hanya oleh rezim yang berkuasa, namun juga oleh masyarakat konsumen media. Namun, Yayan Sakti juga tidak ingin menutup mata terhadap kesalahan-kesalahan yang dibuat media. “Selama ini, pasal-pasal dalam hukum pers kurang mengatur hal tersebut. Yang banyak hanya berisi tuntutan terhadap pihak-pihak yang mencederai media,” jelas Yayan Sakti. (put/rfa)

Belenggu orde baru sudah berakhir lebih dari sepuluh tahun lalu. Kran kebebasan pers yang dulu disumbat rapat, kini terbuka lebar-lebar. Sebagai corong suara masyarakat di era demokrasi, pers sudah seharusnya mampu berteriak lebih lantang dan jujur mengenai realita. Namun, apakah dalam satu dekade terakhir ini peranan pers sebagai jantung negara telah bekerja dengan benar?

Atmakusumah Astraatmadja memotret dengan baik jawaban atas pertanyaan diatas dalam kumpulan tulisannya yang berjudul *Tuntutan Zaman: Kebebasan Pers dan Ekspresi*. Untuk mengapresiasi buku tersebut, digelar pula Seminar Dekriminalisasi Kebebasan Pers dan Ekspresi: Mozaik Sejarah Pers Indonesia pada tanggal 12 Maret 2009.

Seminar ini dilangsungkan di Ruang Adi Sukadana Gedung A lantai 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair). Selain Atmakusumah, hadir pula dua pembicara lainnya, Dra. Rachmah Ida, M.Comm, Ph.D, Drs. Yayan Sakti Suryandaru, M.Si, serta moderator Airlangga Pribadi, M.Sc.

Dalam seminar hasil kerjasama Culture Sapurame, VHRBook, VHRMedia, Yayasan TIFA, dan IKOHI (Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia) ini, Atmakusumah banyak berbagi pengalaman selama menjadi wartawan. Dia juga mengungkapkan, selepas rezim Soeharto merupakan masa kebebasan terlama sepanjang riwayat pers di Indonesia.

Oleh sebab itu, media pers harus bisa menentukan sikap dan mempunyai inde-

pendensi. Tidak harus netral, yang penting punya kebijakan. “Boleh netral, boleh berpihak. Syaratnya, redaksi harus punya tiga pondasi kebijakan, yaitu karya jurnalistik yang dihasilkan harus beritikad baik, tidak punya etika buruk, dan dimaksudkan untuk kepentingan umum,” jelas Atma.

Sebelas tahun terakhir, gembok kebebasan pers memang telah dibuka. Tapi, tidak berarti boleh bersuara seenaknya. Semakin besar kebebasan, semakin besar pula tanggung jawab. “Boleh keras, tapi jangan kasar,” kata wartawan senior era 50-an ini.

Tekanan yang cukup berat sekarang justru datang dari publik. Atma dengan lancar memaparkan beberapa kasus demonstrasi terhadap media pers sebagai bentuk protes masyarakat. Oleh sebab itu, pers harus menyajikan karya jurnalistik yang layak. Acuannya ada tiga: akurat dan faktual, objektif, tidak diskriminatif dan berprasangka. “Kalau media pers memang melanggar hukum, silakan diproses sesuai hukum. Tapi, jangan dibredel.” ujar pria 70 tahun ini.

Mengomentari buku Atma, Dra. Rachmah Ida, M.Comm, Ph.D memuji sikap progresifnya yang matang. Tidak semua aktivis media atau pengelola pers mampu mengingat kasus-kasus yang terjadi secara detil. Pengalaman langsung dalam praktek-praktek pelaksanaan jurnalisisme menguatkan pembahasan buku dan menjadi nilai lebih yang sangat mahal.

Ketua Departemen Komunikasi Unair tersebut menggarisbawahi beberapa hal penting dalam kumpulan tulisan Atma.

Diskusi Ilmiah Reboan Hidup Lagi Setelah 9 Tahun Mati Suri



Dekan FISIP, I. Basis Susilo membuka Diskusi Ilmiah Reboan

Mulai semester ini, tiap hari Rabu minggu I dan III jam kedua yaitu pukul 10.00, kegiatan belajar mengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) ditiadakan. Sebab hari itu dijadikan hari khusus bagi mahasiswa dan dosen untuk menggelar berbagai acara akademis. Salah satunya Diskusi Ilmiah Reboan.

"Diskusi reboan ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 90an," ungkap Karnaji selaku Ka. Bag. Akademik dan Kemahasiswaan FISIP. Menurutnya, diskusi ini dulu diikuti oleh banyak peserta baik mahasiswa maupun dosen. Bahkan di tahun-tahun kejayaannya diskusi ini menghadirkan dosen dari luar FISIP.

Namun, sejak tahun 2000 diskusi ini semakin kekurangan peminat dan akhirnya ditiadakan. Hal ini sangat disayangkan, mengingat kegiatan ini sejatinya memiliki tujuan baik. "Tujuan diadakannya diskusi ini yakni untuk menumbuhkan atmosfer akademik dan menjadi wadah untuk berdialog seputar berbagai hal akademis," ucap Karnaji.

Oleh karena itu, tahun 2009 ini, Diskusi Reboan kembali diadakan dengan tema-tema yang berbeda. Tema-tema diskusi disesuaikan pada empat hal. "Pertama hasil dari tesis dan disertasi dosen. Kedua, kenaikan jabatan dosen. Ketiga, proposal rancangan studi lanjut, serta penelitian-penelitian yang sedang berjalan," terangnya. Diharapkan, dengan adanya diskusi ini, pemakalah dapat memperoleh masukan dari banyak pihak.

Pada pegelaran perdananya tanggal 11 Maret lalu, I. Basis Susilo, Dekan FISIP membuka diskusi dengan menceritakan sejarah Diskusi Reboan. Sementara yang didaulat menjadi pemakalah yaitu Novri

Susan. Doesen Sosiologi ini memaparkan hasil tesisnya yang membahas tentang tata kelola konflik demokratis. Menurutnya konsep manajemen konflik sudah tidak cocok lagi diterapkan di negara-negara demokratis.

"Sebab praktek tawar menawar yang sering diterapkan dalam manajemen konflik memungkinkan kelompok mayoritas menentukan bentuk penyelesaian konflik," ungkapnya. Padahal, di negara demokratis

penyelesaian bukan dengan keputusan sepihak melainkan dengan bermusyawarah bersama. "Konflik pun menjadi lebih produktif. Sejumlah bentuk kekerasan juga dapat dicegah," imbuh Novri.

Pada minggu kedua topik bergulir ke ranah politik. Pemakalahnya Budi Prasetyo dosen Departemen Ilmu Politik. Budi membahas seputar kasus pengelolaan sumber daya air dan pentingnya peran masyarakat dalam pengelolaan tersebut. Berbagai hal yang terkait dengan kasus tersebut diungkap dengan gamblang.

Menurut Budi, program pemberdayaan politik masyarakat yang "berinteraksi" dengan bendungan sangat penting. "Walaupun masyarakat tersebut tidak memiliki kepentingan secara langsung dengan bendungan, pemberdayaan politik tetap penting. Apalagi masyarakat yang tidak punya kepentingan langsung dengan bendungan memiliki peluang besar untuk tidak mempedulikan pembangunan," jelas Budi.

Jika pada minggu pertama peserta yang hadir mencapai 60 orang, pada minggu kedua, jumlah peserta berkurang hingga lima puluh persen. Bahkan mahasiswa tak lagi terlihat terlibat dalam diskusi saat itu. "Karena melihat selama dua minggu jumlah peserta tidak memenuhi harapan, maka diskusi akan diadakan dua minggu sekali," kata Karnaji. Dengan demikian, mulai bulan April 2009, Diskusi Reboan akan diadakan pada minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulannya. (deb/rfa)

Diskusi Lorong Strategi Pengemasan Iklan Iklan Harus Sadar Budget

Pemilu tinggal menghitung hari. Tiga puluh delapan partai politik lolos jaring seleksi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan siap bertarung pamor. Atmosfer persaingan antarpolisi dan calon legislatif tak pelak kian memanas. Semua *jur-joran* mempromosikan diri demi merebut simpati publik pada hari eksekusi nanti.

Cara yang ditempuh guna mengantongi suara rakyat pun bermacam-macam. Salah satu yang jamak digunakan adalah iklan. Namun, bagaimana strategi pengemasan iklan agar pesan mampu menembak sasaran dengan jitu? Didik Prasetyono mencoba mengupasnya dalam diskusi lorong Strategi Pengemasan Iklan yang digelar pada 18 Maret 2009.

Bertempat di lorong Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unair, Didik mencoba membeberkan beberapa resep pengemasan iklan. Yang per-

tama, iklan harus sesuai standar. Standar yang dimaksud adalah regulasi, bisa peraturan KPU ataupun peraturan pemerintah setempat. Jangan sampai iklan yang dibuat menyalahi aturan. Pada dasarnya, semua iklan boleh digunakan asalkan mendapat ijin dari pemerintah setempat. Untuk memperoleh ijin tersebut, tentu harus taat aturan. Misalnya, menggunakan media baliho yang besarnya tidak melebihi ukuran maksimal.

Yang kedua, iklan harus membidik tempat kampanye dengan tepat.

Yang ketiga, iklan harus sadar *budget*. Karena ini menyangkut pendanaan, tentu harus dipersiapkan matang-matang.

Yang keempat, untuk menangkap perhatian publik, iklan juga harus punya ciri khas.

Yang kelima, iklan harus menggunakan teknik komunikasi yang spesifik. (put/rfa)

Diskusi Buku Manajemen SDM Berbasis Kompetensi untuk Pelayanan Publik Bahasan Bagus Estetika Minim



Wali Kota Arif Afandi turut menjadi pembicara

Setiap individu memiliki keunikan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Harus ada kesesuaian antara kompetensi dengan posisi sehingga tumbuh motivasi dalam bekerja. Standardisasi yang dipukul rata pada semua karyawan organisasi birokrasi terutama lembaga pemerintahan merupakan cara usang yang perlu ditinggalkan. Manajemen SDM berbasis kompetensi menawarkan suatu paradigma baru dalam mengelola manusia dengan memperhatikan setiap potensi individu supaya muncul nuansa ganda: kebanggaan, semangat kerja, serta tanggung jawab.

Inilah spirit yang dapat disari dari buku *Manajemen SDM Berbasis Kompetensi untuk Pelayanan Publik* (MSDMBKPP) yang ditulis oleh Sjahrazad Mazdar, Sulikah Asmorowati, dan Jusuf Irianto. Demi menghimpun kritik dan masukan, ketiganya menggelar diskusi pada 11 Maret 2009. Bertempat di Aula Gedung C Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair), diskusi ini menghadirkan tiga pembicara. Ketiga pembicara tersebut yaitu Arif Affandi (Wakil Walikota Surabaya), Drs. Aribowo, M.A. (Dekan Fakultas Ilmu Budaya Unair), dan Prof. M. Mas'ud Said, Ph.D (Universitas Muhammadiyah Malang).

Pendidikan tinggi di mana saja telah dianggap masyarakat sebagai rumah bagi kajian ilmiah dan pusat penemuan baru. Buku MSDMBKPP, selain memberi sumbangan berarti bagi Unair, juga menjadi bukti atas pemenuhan harapan masyarakat terhadap institusi pendidikan tinggi. MSDMBKPP sekaligus memberi pijakan kuat bagi kajian dan pengembangan SDM untuk pelayanan publik, mengingat persoalan tersebut telah

lama dirasakan namun belum banyak digali secara mendalam dan tuntas.

Demikian disampaikan Prof. M. Mas'ud Said, Ph.D mengawali diskusi buku MSDMBKPP. Mas'ud memberikan penilaian dari berbagai aspek; struktur buku dan kecermatan penulisan, *urgency keywords* dan kemutakhiran referensi, serta koherensi dan alur pemikiran buku. Menurut Mas'ud, isi MSDMBKPP cukup koheren dari awal bab hingga akhir. Termasuk, keseragaman gaya bahasa. "Biasanya, itu yang menjadi kendala dalam menulis (secara) kolaborasi," puji Mas'ud. Kesalahan-kesalahan minor namun penting seperti ejaan dan akurasi juga sangat jarang ditemukan.

Mas'ud mengungkapkan, seringkali pembaca dibuat kecele dengan penampilan buku. Ada buku yang tebal dan terdiri atas banyak bab, tapi topiknyanya tidak sesuai dengan judul buku dan pembahasannya ke sana kemari. Sebaliknya, ada pula buku yang terkesan efisien dengan referensi halaman cukup tipis dengan harapan disiplin pada topik, tapi kurang berbobot. "Untuk

membuat buku ilmiah yang mengalir memang sulit," katanya. Buku MSDMBKPP, lanjut Mas'ud, cukup memiliki alur pemikiran yang logis dan mengalir dengan komposisi serta koherensi yang pas.

Sebagai seniman, Drs. Aribowo, MA banyak memberi pandangan dari sisi artistik. Menurutnya, buku MSDMBKPP sangat minim pujian dari segi desain. "Saya senang baca dari awal sampai akhir buku, bahasanya bagus, temanya runtut, teorinya lengkap, tetapi dari sudut estetika tidak indah sama sekali. Cover, font tulisan, dan desainnya kurang menarik," ujarnya. Akibatnya, muncul kesan yang sangat lokal. Buku MSDMBKPP seolah-olah hanya ditujukan pada publik Surabaya. "Harapan saya, buku ini bisa dicetak ulang dan diperbaiki," kata Aribowo.

Pengalaman sebagai birokrat membuat Arif Affandi matang dalam mengupas MSDMBKPP dari kacamata praktis. Namun, bertahun-tahun bergelut dalam dunia jurnalistik sebagai wartawan tak ayal mengasah pula ketajaman intuisinya di bidang tulis-menulis. Arif Affandi memaparkan beberapa catatannya mengenai MSDMBKPP.

Yang pertama, hampir senada dengan Aribowo, MSDMBKPP dianggap kurang punya nilai jual. "Begitu saya terima buku ini, *image*-nya adalah buku akademik," ungkap Arif. Padahal, menurutnya, secara tema, pangsa MSDMBKPP ini tidak hanya mahasiswa atau kaum akademisi perguruan tinggi saja. Tetapi juga para birokrat. Apabila dikemas dengan lebih baik, Arif bahkan optimis buku ini bakal menjadi *best-seller*.

Judul buku, menurutnya, juga terlalu panjang dan sangat akademis. "*Mocone ngos-ngosan*," ungkap pendamping Bambang DH ini bercanda. Dia menyarankan, judul dipadatkan menjadi Birokrasi Berbasis Kompetensi. "Lebih greng. Lebih luas pasarnya," katanya lagi. Selain itu, kalimat-kalimat dalam MSDMBKPP sebaiknya jangan terlalu 'professor' alias rumit. (put)



Suasana diskusi di Aula Gedung C

India Sasaran Studi Potensial



Suasana seminar di Aula Gedung C FISIP

Selama ini, Indonesia lebih banyak mengenal India sebagai negara produsen film. Sepak terjang India di bidang pendidikan, acapkali terlewatkan. Untuk mengenyam bangku kuliah, pelajar-pelajar Indonesia lebih memilih Singapura, Australia, bahkan Amerika Serikat. Padahal, negara yang terkenal berkat *Bollywood*-nya itu punya banyak perguruan tinggi berkualitas sebagai destinasi pendidikan.

Hal tersebut disampaikan Dr. Shaik Suleman, *Head of Placement and Secondment Division* EdCIL (*Educational Consultants India Limited*) dalam Seminar *Cum-Student Counselling Sessions Indian Higher Education* yang digelar pada tanggal 5 Maret 2009. Bertempat di Aula Gedung C FISIP Unair, seminar dibuka oleh Dekan FISIP Unair drs. I. Basis Susilo, MA. Hadir dalam seminar tersebut antara lain Vankart (perwakilan Duta Besar India), Manoj Bhat, B.E., M.B.A. (Koordinator EdCIL Surabaya), perwakilan Dinas P dan K Surabaya, Sutrisno, serta perwakilan-perwakilan EdCIL India dan puluhan pelajar SMA YPPI I Surabaya.

EdCIL merupakan perusahaan sektor publik milik pemerintah yang telah dinasionalisasi oleh BUMN India sejak tahun 1981. Di bawah kendali administrasi Kementerian Pembangunan Sumber Daya Manusia, EdCIL berfungsi memberikan pelayanan dalam penempatan Siswa Asing (*International Students*), Non-penduduk India (*NR*), dan Penduduk Keturunan India (*PIO*) dari seluruh dunia untuk belajar di India. Selama 27 tahun terakhir, EdCIL melaksanakan tugasnya melalui skema sponsor pemerintah asing, sponsor swasta, dan biaya sendiri.

"EdCIL memiliki jaringan dengan universitas dan lembaga pendidikan teratas di India," kata Shaik Suleman. Institusi pendidikan di India yang menjalin kerjasama dengan Indonesia di bawah naungan EdCIL antara lain *BMS Educational Trust, Brindavan College, Dayananda Sagar Institutions, Gujarat University, Navodaya Education Trust, Nitte Meenakshi College of Engineering and Technology, PSNA College of Engineering and Technology*, dan *TKM Educational Trust*.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, EdCIL memutar film-film dari beberapa institusi pendidikan yang ditawarkan. Film ini berisi pengenalan universitas, mulai dari pilihan jurusan, sarana dan fasilitas, dokumen-

tasi berbagai kegiatan, hingga testimoni mahasiswa.

Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk studi di India? Nominalnya beragam, tergantung jurusan yang ditempuh. Untuk jenjang sarjana MIPA/Seni/Niaga/Sastra, misalnya, biaya yang diperlukan (sudah termasuk SPP dan akomodasi) sebesar US\$2200-US\$7000. Sementara untuk jurusan Teknik/Arsitektur, US\$4400-US\$12000.

Namun, tidak perlu khawatir tercekik biaya. "Sebab, untuk memudahkan para siswa asing dalam menempuh pendidikan di India, EdCIL juga menawarkan kesempatan beasiswa," jelas Shaik Suleman. Melalui seminar ini, pihak EdCIL berharap India mampu menjadi alternatif sasaran studi dan menyemarakan peta pendidikan para pelajar di Indonesia. "Apalagi, jarak Indonesia-India sebenarnya tidak sejauh yang kalian bayangkan selama ini," imbuhnya. (put/rfa)

Seminar Planning For Our Future

Rencanakan Masa Depan Sejak Dini

Sebagai mahasiswa, sudahkah kita merencanakan apa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang? Pertanyaan itulah yang menjadi latar belakang digelarnya Mini Seminar dan *Discussion Group* di ruang Adi Sukadana, 13 Maret 2009. Melalui seminar yang diadakan EF (*English First*) bekerja sama dengan Bengkel Bahasa A3 Grant Program International Relations Department Universitas Airlangga (Unair) ini, diharapkan mahasiswa mendapat panduan dalam merancang masa depannya.

Menurut Irene Kustedja selaku *Country Product Manager EF Academic Program*, masih banyak orang yang tidak tahu apa yang ingin dicapai dalam hidupnya. "Padahal merencanakan masa depan itu sangat penting. Dengan merencanakan apa yang ingin kita lakukan untuk 5 tahun, 10 tahun, hingga 20 tahun mendatang, kita jadi lebih fokus untuk meraih masa depan yang lebih baik," jelas Irene. Selain itu, kita juga akan lebih mudah menemukan cara-cara untuk mewujudkan impian masa depan kita.

Terlebih, saat ini, kita hidup di era globalisasi yang penuh dengan persaingan. Kita perlu membekali diri dengan keterampilan global supaya bisa tetap *survive* di lingkungan global. Menguasai bahasa asing setidaknya bahasa Inggris bisa menjadi salah satu solusi *survive* di era serba modern ini. "Lebih baik lagi kalau kita juga menguasai bahasa asing selain bahasa Inggris. Itu akan membuat kita jadi lebih siap bersaing di era globalisasi seperti sekarang," ucap Irene.

Meski begitu, masih menurut Irene, menguasai banyak bahasa asing ternyata belum cukup. Ada dua hal lain yang perlu dipersiapkan sebagai bekal di masa yang akan datang,

meliputi kemampuan praktis seperti desain grafis dan *public speaking*. Juga, meraih ijazah kelulusan dari universitas di luar negeri. "Saat ini, bukan hal mustahil bagi kita untuk mendapat ijazah dari luar negeri. Kita bisa mencari beasiswa, mengikuti kuliah jarak jauh secara *online*, atau kuliah di universitas dalam negeri namun mempunyai pusat di luar negeri," ujar Irene.

Setelah lulus dari bangku kuliah, entah dari dalam atau luar negeri, hal pertama yang akan terpikir dibenak kita pastilah mendapat pekerjaan secepat mungkin. Untuk itu, kita perlu memiliki kemampuan menulis *application letter* dan CV (*Curriculum Vitae*) yang baik. "Sebagian orang sering asal dalam menulis *application letter*. Padahal hal itu merupakan sarana bagi kita untuk menjual diri kepada perusahaan yang kita incar," kata Irene. Karena itu, menurut Irene, *application letter* perlu dibuat semenarik mungkin agar pihak perusahaan mau membaca surat lamaran kita.

Kita juga sebaiknya menulis *application letter* secara spesifik. Artinya, kita harus mampu menuliskan posisi yang kita inginkan di perusahaan yang kita incar serta alasan kita menginginkan posisi tersebut.

Sementara kita terus mempersiapkan *application letter* dan CV kita, kita juga tidak boleh lupa untuk memperluas jaringan atau koneksi dengan banyak pihak. Dengan demikian, kita akan memperoleh banyak informasi yang mungkin dapat membantu kita dalam proses mencari pekerjaan. "Memperluas koneksi dengan banyak orang juga salah satu proses belajar yang sangat kita perlukan demi memperlancar jalan kita untuk meraih impian yang telah kita rencanakan, yaitu bekerja," ujar Irene. (int/rfa)

Senin, 23 Maret 2009, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair) kedatangan sejumlah tamu dari Brazil. Mereka adalah Duta Kebudayaan Brazil. Para Duta Kebudayaan tersebut hadir untuk menjadi pembicara pada kuliah tamu Komunikasi Multikulturalisme. Uniknya, meski mengangkat tema tentang komunikasi, kuliah tamu tersebut juga dihadiri oleh sejumlah mahasiswa dari Departemen Hubungan Internasional (HI) dan Departemen Ilmu politik.

Dalam acara yang diadakan di ruang Adi Sukada ini, para duta asal Brazil tersebut berusaha memperkenalkan kebudayaan Brazil. Pada awal kuliah tamu, mereka menjelaskan tentang keragaman budaya di Brazil. Luiz Cabeleira, salah seorang Duta Kebudayaan Brazil, mengatakan bahwa Brazil merupakan salah satu bangsa yang majemuk.

Beberapa abad yang lalu, bangsa portugis membawa budak-budak Afrika ke tanah Brazil melalui empat jalur. "Walaupun sama-sama bangsa Afrika, mereka berasal dari suku yang berbeda-beda," kata Luiz Cabeleira. Masih menurut laki-laki jangkung ini, selama bertahun-tahun, bangsa Afrika hidup di bawah tekanan para penjajah. Mereka menerima penyiksaan baik secara fisik maupun mental. "Ketika itu, Capoeira dan Samba menjadi hiburan bagi mereka," ungkapnya.

Capoeira merupakan bela diri Afrika yang kemudian dijadikan tari-tarian dan menggunakan alat musik perkusi sebagai iringannya. Dalam perkembangannya, Capoeira sempat mendapatkan cap buruk. Capoeira dikatakan sebagai kesenian kaum rendahan hingga tarian khusus pencuri. Hingga akhirnya, pada abad ke 19, Capoeira dilarang oleh pemerintah. "Beberapa tahun kemudian, muncul tiga tokoh yang membawa perubahan bagi Capoeira," terang Luiz Cabeleira.

Afrika Pengaruhi Budaya Brazil



Duta budaya Brazil memamerkan syair music capoeira

Tidak hanya diperbolehkan untuk ditampilkan dan dilakukan lagi, Capoeira bahkan dikembangkan dengan berbagai unsur kebudayaan lain. "Dalam syair musik Capoeira, dimasukkan juga dongeng dan bahasa portugis," ceritanya. Oleh karena itu, Capoeira pun menjadi produk enkulturasi dari berbagai kebudayaan di Portugis.

Luiz Cabeleira tidak hanya menceritakan tentang perkembangan Capoeira, ia juga menjelaskan tentang Samba, tarian yang juga sangat terkenal di Brazil. Menurutnya, tari samba juga merupakan hasil dari budaya Afrika.

Menyimak sejarah Capoeira dan Samba, dapat diketahui bahwa kebudayaan Brazil sebagian besar dipengaruhi oleh kebudayaan Afrika. Meski demikian, Luiz Cabeleira mengatakan bahwa ada pula kebudayaan bangsa lain yang turut mempengaruhi kebudayaan Brazil. "Sebab Brazil tidak hanya terdiri dari bangsa Afrika dan

portugis saja, ada pula bangsa Indian dan Jepang," ujarnya.

Karena banyaknya suku bangsa yang menetap di Brazil, mulai tahun 1988 pun diberlakukan undang-undang yang berpihak pada kaum minoritas. Undang-undang ini memuat tentang pe-larangan tindakan rasisme. "Pelaku rasisme akan dikenai hukuman yang sangat berat," kata Luiz Cabeleira.

Usai menjelaskan berbagai hal tentang berbagai kebudayaan di Brazil, para Duta ini menunjukkan kebolehannya memainkan alat musik perkusi khas Afrika. Mereka juga mengajak para mahasiswa untuk ikut menyanyi lagu *Boa Visc* bersama. Kuliah tamu ini diakhiri dengan pemberian tanda mata oleh ketua Departemen Komunikasi kepada wakil dari Duta Kebudayaan Brazil, Luiz Cabeleira.

(deb/rfa)

Kuliah Tamu CSR PT. Freeport Indonesia CSR, Bukti Komitmen PTFI

Berkarya Menuju Pembangunan Berkelanjutan. Itulah visi yang menjadi fokus PT Freeport Indonesia (PTFI) saat ini. Sebagai perusahaan besar yang telah menjadi bagian dari Indonesia lebih dari 40 tahun, PT Freeport Indonesia berusaha menyeimbangkan pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan bagi masyarakat serta kegiatan perusahaan. Bukti dari komitmen tersebut tercermin dalam program-program CSR (*Corporate Social Responsibility*) salah satu wajib pajak terbesar di Indonesia itu.

Bertempat di ruang Adi Sukadana, 10 Maret lalu, Mindo Pangaribuan selaku *External Stakeholder Relations Manager PT Freeport Indonesia* memaparkan program-program CSR yang telah dilakukan oleh PTFI. Program CSR tersebut meliputi bidang ekonomi, dana kemitraan untuk pengembangan masyarakat, keselamatan kerja, dan pengelolaan lingkungan. "CSR yang kami lakukan adalah bukti komitmen kami untuk

mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kami berharap bisa memberi manfaat khususnya bagi masyarakat Papua," ucap Mindo.

Di bidang ekonomi, PTFI saat ini menjadi penyedia lapangan kerja swasta terbesar di Papua. Hal ini dibuktikan oleh para ahli ekonomi Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FE UI. Dikatakan, PTFI menciptakan 20 tambahan pekerjaan tidak langsung untuk setiap karyawan langsung perusahaan. Sehingga, menambah 238.000 pekerjaan bagi ekonomi nasional tahun 2007.

Selain itu, negara juga memperoleh manfaat langsung misalnya dari pajak, retribusi, *royalty*, atau dividen. "Secara keseluruhan, PTFI memberi kontribusi 1,3 persen dari jumlah total pendapatan rumah tangga nasional dan 25 persen di Papua," jelas Mindo.

Tidak hanya di bidang ekonomi, PTFI juga menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan warga Papua melalui dana kemitraan untuk pengembangan masyarakat. Dana ini dikelola

dan disalurkan oleh organisasi Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK). "Keberadaan LPMAK sangat membantu PTFI dalam menyalurkan bantuan dana kepada masyarakat Amungme, Kamoro juga lima suku di Kabupaten Mimika, yaitu suku Dani, Moni, Ekari/Mee, Damal dan Nduga," kata Mindo.

PTFI juga menunjukkan keseriusannya dengan menggunakan Sistem Peringkat 5 Bintang NOSA (*National Occupational Safety Association*) dan Program Akuntabilitas Pengawasan Keselamatan untuk mengukur kinerja pengawasan keselamatan.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang industri logam, kegiatan operasi PTFI tentunya menimbulkan dampak bagi lingkungan sekitar. Sadar akan hal itu, PTFI bertekad mengelola dampak dari kegiatan operasinya terhadap lingkungan, misalnya dengan mereklamasi dan menghijaukan kembali lahan yang terkena dampak.

Sistem Pengelolaan Lingkungan PTFI mendapat sertifikasi ISO 14001. "Sertifikasi ini menjadikan PTFI semakin giat meningkatkan kinerja mengurangi dampak lingkungan," ujar Mindo menutup kuliah tamu PTFI siang itu. (int/rfa)

FISIP Luluskan 224 Mahasiswa

BAGI mahasiswa, kelulusan merupakan salah satu hal yang paling dinantikan. Walau demikian, kelulusan itu sendiri tidak mudah untuk didapatkan. Tidak hanya harus menyelesaikan skripsi, lulus atau tidaknya seorang mahasiswa juga ditentukan melalui yudisium yang dilakukan oleh pihak Fakultas.

Untuk menentukan siapa saja yang berhak lulus semester gasal tahun ajaran 2008-2009, 4 Maret 2009 lalu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair) pun menyelenggarakan rapat yudisium. Berdasarkan hasil rapat, total terdapat 205 mahasiswa lulusan D3 dan S1 yang berhak menyandang gelar Sarjana pada semester gasal ini. Selain itu, ada 19 mahasiswa S2 yang juga dinyatakan lulus.

Ditemui di kantornya, Drs. Jadimin, Kepala Sub Bagian Akademik FISIP Unair menjelaskan beberapa kriteria kelulusan. Kriteria tersebut

diantaranya sudah memenuhi minimal 144 satuan kredit semester (SKS), sudah menyelesaikan semua matakuliah wajib dan matakuliah wajib terbatas, serta memiliki nilai D kurang dari sama dengan 20 persen.

"Dan yang pasti, mahasiswa tersebut harus sudah menyelesaikan dan menyerahkan perbaikan tugas akhirnya," jelas Jadimin. Untuk lulusan terbaik, Jadimin mengatakan bahwa fakultas akan memberi *award* tersendiri. *Award* tersebut berupa beasiswa Rp 1 juta untuk lulusan terbaik D3 dan Rp 1,5 juta untuk lulusan terbaik S1.

Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan boleh berbangga. Sebab, salah satu mahasiswanya terpilih menjadi lulusan terbaik S1 Yudisium kali ini. Mahasiswa tersebut adalah Agus Santoso yang berhasil menyelesaikan studinya selama 7 semester dengan Indeks

Jenjang	Nama	Prodi	IPK
D3	Anita Erna Faricha	PSTP	3,83
S1	Agus Santoso	IIP	3,90
S2	Dra. Rahma Sugiharti	PSDM	3,94
Program Studi		Jumlah Lulusan	
Administrasi Negara		23	
Antropologi		21	
Hubungan Internasional		39	
Ilmu Informasi dan Perpustakaan		7	
Komunikasi		33	
Ilmu Politik		19	
Sosiologi		18	
D3 PSTP		18	
D3 Pariwisata		27	
TOTAL		205	

sumber : akademik FISIP Unair

Prestasi Kumulatif (IPK) 3,9. Sedangkan lulusan terbaik S2 dan D3 masing-masing disabet oleh Dra. Rahma Sugiharti dari prodi Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) dan Anita Erna Faricha dari prodi Teknisi Perpustakaan.

(zaq/rfa)

SEBELUM memulai segala sesuatu yang besar, sebaiknya dilakukan persiapan sejak awal. Segala kekurangan dan kegagalan di masa lalu, sudah sepantasnya dievaluasi agar tidak terulang. Terobosan-terobosan baru yang sekiranya menjadi penambah semangat di kemudian hari juga selayaknya direncanakan sejak dini. Begitu juga yang terjadi pada perkuliahan semester genap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair) yang dimulai pada 10 Maret 2009 lalu. Pihak fakultas menyambut perkuliahan tersebut dengan sukacita dan semangat baru melalui Pembukaan Perkuliahan 4 Maret 2009.

Agenda rutin fakultas tiap awal semester ini ternyata sudah dilakukan sejak 1978. Tidak hanya dihadiri oleh beberapa elit dekanat dan staf, acara ini juga diramaikan seluruh dosen FISIP beserta sejumlah mahasiswa perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Badan Legislatif Mahasiswa (BLM).

Dimulai pukul 11.00 WIB, acara ini dibuka sambutan Dekan yang memuat harapan-hara-

Semangat Baru Sambut Perkuliahan

pan ke depan. Selanjutnya, dilakukan pembacaan sejumlah agenda-agenda penting pada semester ini. Seperti adanya pengawasan Ujian Nasional (Unas) SMA pada 20-25 April 2009 di kabupaten Gresik, Lamongan, serta Bojonegoro yang dilakukan oleh seluruh dosen fakultas. Imbas dari sistem Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) yang sekarang melibatkan pihak Universitas dalam pengawasan Unas ini ditiadaknya kegiatan perkuliahan aktif di kampus selama tanggal tersebut.

Selain itu tidak ketinggalan pengumuman diselenggarakannya "Diskusi Reboan" pada hari Rabu setiap minggunya di Ruang Adi Sukadana. Agenda fakultas yang baru diadakan semester ini berupa diskusi ilmiah antar pihak dekanat, staf, beberapa dosen beserta beberapa mahasiswa dari BEM, BLM, serta Himpunan Mahasiswa (Hima) dari masing-masing Prodi. "Melalui Diskusi Reboan, saya harap

banyak bermunculan kegiatan-kegiatan yang bersifat ilmiah di kampus ini," ungkap I. Basis Susilo, Dekan FISIP Unair. Ia menambahkan, "diharapkan diskusi ini juga berperan sebagai penyambung antara pemikiran fakultas dengan mahasiswa, serta sebaliknya."

Acara dilanjutkan dengan pembacaan pengumuman kenaikan pangkat dan studi ke luar negeri bagi para dosen dan staff. Kemudian, diakhiri dengan jamuan bersama sivitas akademika FISIP yang hadir siang itu. Basis berharap dengan agenda semacam ini di awal perkuliahan dapat meningkatkan silaturahmi dan keakraban antar warga FISIP. Juga, sebagai sarana untuk *sharing* antar elemen kampus.. "Seperti kegiatan-kegiatan lainnya yang diawali dengan doa dan harapan, pada perkuliahan semester ini kami harap segala yang telah kami agendakan ke depan berjalan lancar," tegas Basis. (zaq/rfa)

SPP Maba FISIP Naik 33 Persen

FAKULTAS Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) memasang kebijakan baru terkait biaya pendidikan. Untuk mahasiswa angkatan 2009 nanti, uang SPP mengalami kenaikan sebesar 33 persen. Dengan demikian, untuk mahasiswa yang masuk melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), SPP per semester yang sebelumnya sebesar Rp 600.000,00, naik menjadi Rp 800.000,00. Sementara itu, untuk mahasiswa yang diterima melalui jalur Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK) umum, akan dikenai SPP sebesar Rp 3.325.000,00 dari semula Rp 2.500.000,00.

Menurut Dekan FISIP, drs. I. Basis Susilo, MA, kebijakan untuk menaikkan SPP sebenarnya sudah digodok cukup lama. Rapat bersama pimpinan universitas, senat universitas dan majelis wali amanah yang melibatkan wakil mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Badan Legislatif Mahasiswa (BLM) telah pula digelar guna menampung berbagai aspirasi.

Hasilnya, Unair memang harus berbenah diri. Gelar Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang disandang menuntut kemandirian masing-masing fakultas dalam memenuhi kebutuhan. "Kami sudah mengupayakan agar kenaikan tidak begitu signifikan. Tetapi, semuanya kembali lagi pada keputusan rector," jelas I Basis Susilo.

Dana tambahan 33 persen tersebut, menurut I Basis Susilo, akan digunakan untuk menutup kebutuhan fakultas. Misalnya, dana Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan bantuan skripsi. Sebelumnya, kedua kegiatan tersebut disokong oleh APBN pemerintah. Namun, setelah Unair mencapai status BHP, biaya-biaya tersebut menjadi tanggungan fakultas. "Untuk memperlancar perkuliahan, mau tidak mau uang SPP memang harus disesuaikan," katanya lagi.

Mengenai kenaikan tersebut, I Basis Susilo menghimbau agar mahasiswa mampu menyikapi secara bijaksana. Selama ini, biaya SPP Unair berada di bawah perguruan tinggi lainnya, seperti

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan Universitas Brawijaya (Unibraw).

Naiknya SPP tak pelak mengundang pro dan kontra berbagai pihak, terutama mahasiswa. Meskipun tidak terkena imbas, kebanyakan merasa prihatin. Apalagi, kabar yang tersiar cenderung simpang siur. Akibatnya, banyak mahasiswa yang kebingungan. Tresye Justin Sumenge, misalnya. Mahasiswa Sosiologi angkatan 2007 mengaku, dirinya tidak setuju bila SPP mahasiswa baru FISIP dinaikkan.

Asadur Rahman Muhammad sedikit berbeda. Mahasiswa Ilmu Politik angkatan 2007 yang kerap disapa Cliff ini awalnya memang tidak setuju. Namun, mengingat Unair yang dituntut untuk mandiri, Cliff harus mendukung kebijaksanaan universitas. Cliff berharap, kenaikan SPP ini tidak sekedar dibebankan pada mahasiswa. Ada baiknya bila pihak fakultas juga menunjukkan perbaikan. Misalnya, peningkatan sarana dan prasarana. "Tapi, ini harus dilakukan dengan cepat demi menunjang proses perkuliahan," ungkap Cliff. (put/rfa)

Unair Bantah SOP Naik Hingga 80%



Forum terbuka antara pihak fakultas dengan mahasiswa tanggal 18 Maret lalu.

Maraknya pemberitaan tentang kenaikan Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP) Universitas Airlangga (Unair) di media cetak akhir-akhir ini memunculkan berbagai tanggapan dari sejumlah elemen kampus. Organisasi intra kampus maupun ekstra kampus berpendapat landasan kenaikan SPP ini akan merugikan bagi mahasiswa terutama mahasiswa baru. Pro-Kontra tentang hal ini pun kian merebak, hingga berujung pada pertemuan antara wakil dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Badan Legislatif Mahasiswa (BLM) dengan Rektor pada beberapa waktu lalu.

Berangkat dari hal itu, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) pun berinisiatif menggelar forum terbuka antara pihak fakultas dengan mahasiswa pada 18 Maret lalu. Selain elit Dekanat, staf, serta mahasiswa, forum tersebut dihadiri juga oleh Direktur Keuangan Unair, Dr. Mohammad Nasih, SE, Ak. MT, selaku pembicara utama.

Dalam forum tersebut Nasih membantah kenaikan SOP hingga 80 persen. "Jika sebelumnya media memberitakan 80 persen, hal tersebut tidak benar," tegasnya. Ia lantas menambahkan, "SOP tersebut memang benar naik, tapi hanya sampai pada skala 30 persen." Selain itu kenaikan SOP tiap-tiap fakultas juga berbeda-beda. Tergantung kebutuhan setiap fakultas. Seperti FISIP dan Fakultas Ilmu Budaya (FIB) misalnya, yang tadinya Rp 600.000 tiap semester menjadi Rp 800.000 per semester. Hal ini berbeda dengan versi media cetak lokal yang mengatakan perubahan SOP dari Rp 600.000 menjadi Rp 1.000.000,-

Kenaikan yang dinilai berat oleh berbagai pihak tersebut ternyata bukan tanpa sebab. Alokasi dana APBN yang selama ini ada dinilai tidak mencukupi kebutuhan-kebutuhan Unair secara keseluruhan. Dana APBN senilai Rp 202 M pada 2009 dirasa hanya dapat *cover* fasilitas-fasilitas umum universitas. Seperti jalan umum, taman kampus, keperluan alat tulis kantor (ATK) manajemen, dan kebutuhan operasional kuliah lainnya. Untuk biaya penggunaan dan perawatan fasilitas *primer* fakultas seperti listrik, telepon, dan air hanya dapat mencukupi selama enam bulan saja.

"Anggaran kebutuhan tersebut belum termasuk pengembangan kebutuhan tiap-tiap fakultas, yang jelas membutuhkan fasilitas berbeda-beda," terang Nasih.

Menurut Nasih, naiknya angka SOP untuk mahasiswa baru tidak lain adalah untuk mempertahankan agar semua fasilitas dapat berfungsi normal. Jikalau ada kelebihan anggaran di kemudian hari, nantinya akan disisihkan untuk penambahan fasilitas lainnya seperti ruang kuliah dan ruang diskusi mahasiswa. Namun untuk sementara ini dirinya berjanji akan menambah kualitas layanan Universitas baik fisik maupun jasa sehingga sebanding dengan kenaikan yang terjadi.

Berbicara masalah jasa, Nasih juga tidak

memungkiri kenaikan SOP tersebut guna menambah kesejahteraan dosen dan tenaga pengajar lainnya. Hingga kini masih terjadi ketidakseimbangan antara status pendidikan para dosen, yang notabene banyak yang sudah Guru Besar, namun tidak diimbangi dengan kesejahteraan yang layak. "Orientasi kami disini adalah bagaimana agar kepedulian kami terhadap Unair dipahami secara bersama-sama," ujarnya.

PEMBENAHAN STUDENT CENTER

Tidak hanya membahas isu kenaikan SOP, agenda forum siang itu juga dilanjutkan dengan sosialisasi pembenahan Student Center (SC). SC yang seharusnya menjadi kantor administrasi setiap lembaga mahasiswa di FISIP kini beralih fungsi menjadi gudang dan bahkan tempat singgah. Keadaan memprihatinkan tersebut membuat Wadep II, Drs. Djoko Adi Prasetyo M.Si. angkat bicara pada forum itu. Dirinya mengaku amat prihatin terhadap keadaan SC sekarang. "Saat ini, SC sangat jauh dari fungsinya sebagai kantor administrasi," ujarnya.

Sebagai langkah awal dirinya sudah memohon pada Ikatan Orang Tua Mahasiswa (IKOMA) agar di tiap-tiap ruang SC disediakan fasilitas komputer beserta printernya. Selanjutnya juga akan dibuat peraturan tertulis guna menertibkan pemakaian fasilitas SC. Diantaranya, jam operasional SC dibatasi dari pukul 07.00 hingga 18.00. Selain itu, SC hanya boleh disinggahi jika ada event-event besar seperti penerimaan mahasiswa baru ataupun seminar-seminar berskala nasional. (zaq/rfa)

Tidak Ada Toleransi Jatah Absen

BERBICARA perihal izin meninggalkan kuliah, kadang terdengar sepele di telinga mahasiswa. Jatah 30 persen absen kuliah yang ditetapkan seringkali diabaikan. Akibatnya, ketika absen tersebut melebihi persentase tersebut, mau tak mau si mahasiswa harus terkena "tilang" dan tidak dapat mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS). Hal ini umumnya berujung dengan tindakan mengulang matakuliah yang sama di semester-semester berikutnya. Sungguh disayangkan apabila mahasiswa tersebut sebenarnya memiliki prestasi akademik yang baik.

Dr. Drs. Musta'in, M.Si, Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair) membenarkan bahwa ada aturan yang sangat ketat terkait kebijakan absen ini. "Memang aturannya mahasiswa hanya boleh meninggalkan kuliah maksimal 30 persen dari jumlah pertemuan," tegasnya. Alasan sakit, bepergian, atau perihal kematian sekalipun hanya dapat diizinkan sejumlah 30 persen jumlah pertemuan. Itu berarti hanya sekitar 3-4 kali ketidakhadiran tiap semesternya. Diluar angka tersebut, kampus mengakui tidak ada toleransi lagi. "Peraturan meninggalkan kuliah ini sebenarnya sedikit lebih ringan ketimbang jaman saya kuliah dulu,

yang hanya 25 persen absen," tambah Musta'in.

Unair memberi dispensasi ketidakhadiran diatas 30 persen hanya jika mahasiswa yang bersangkutan terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat kurikuler maupun ekstra kurikuler minimal tingkat nasional. "Event-event seperti Lomba Karya Tulis Mahasiswa (LKTM), Debat Ilmiah, Kejuaraan Olahraga dan *event-event* nasional lainnya dapat meninggalkan perkuliahan sesuai prosedur yang berlaku. Itupun tidak lebih dari 50 persen jumlah pertemuan," ujar Musta'in, yang juga dosen di Departemen Sosiologi ini.

Hal tersebut dipertegas oleh pernyataan Drs. Jadinin, Kepala Sub Bagian Akademik FISIP. "Kebijakan akademik itu dapat diperoleh dengan mengajukan surat izin meninggalkan perkuliahan kepada Dosen Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJMK) atau Kepala Departemen masing-masing prodi terlebih dahulu," ujarnya. Dari surat izin tersebut nantinya akan ada surat pengantar dari Departemen. Untuk proses ke dekanat, surat pengantar akan disertai surat izin dari fakultas. Surat izin fakultas tersebut dapat di peroleh di bagian Akademik, dan untuk selanjutnya diproses menuju pihak Dekanat. (zaq/rfa)

DP2M Sosialisasikan P2M

K eberadaan suatu program tidak akan direspon dengan baik oleh berbagai kalangan jika tidak melewati proses sosialisasi. Sadar akan hal tersebut, Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DP2M) pun melakukan sosialisasi terkait dengan adanya program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P2M).

Sosialisasi yang dilangsungkan pada 11 Maret 2009 di ruang Adi Sukada ini ditujukan kepada para dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair). "Melalui sosialisasi ini diharapkan dapat menarik minat para dosen untuk mengadakan penelitian dan melakukan pengabdian kepada masyarakat," jelas Drs. I. Basis Susilo, MA selaku Dekan FISIP.

Rapat sosialisasi ini diawali dengan paparan mengenai program pendanaan DP2M yang meliputi dana Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (Dikti), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), lembaga donor lain, serta dana insentif Riset dan Teknologi (Ristek). Menurut Prof. Dr. Bambang Sektiari L., DEA, drh selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Unair, dana-dana tersebut digunakan untuk mendanai program-program yang dimiliki oleh DP2M. Program yang dimaksud antara lain adalah program Penelitian Fundamental, program Penelitian Hibah Bersaing, dan Hibah Kompetisi.

Program Penelitian Fundamental merupakan program penelitian multitahun. "Multi-

tahun maksudnya program ini berlaku dalam jangka waktu dua tahun. Tujuan program ini untuk meningkatkan mutu pengembangan serta memperkaya khazanah ilmu pengetahuan," ucap Bambang. Usulan dana yang bisa diajukan untuk program ini maksimal 40 juta rupiah pertahun.

Berbeda dengan Penelitian Fundamental, program Penelitian Hibah Bersaing lebih berorientasi pada penggunaan atau aplikasi dari hasil penelitian yang didapat. Dana yang disediakan untuk program Hibah Bersaing maksimal mencapai 50 juta rupiah pertahun.

Program yang juga ditawarkan DP2M adalah Hibah Kompetisi yang bertujuan untuk mendorong dan memfasilitasi pengembangan potensi para dosen atau peneliti yang konsisten dan kompeten di bidangnya. Dana yang diperoleh dari program ini maksimal 100 juta pertahun. Dosen atau peneliti yang mendapat dana ini wajib menunjukkan bukti-bukti dari penggunaan dana Hibah Kompetisi. "Buktibuktinya meliputi sertifikat HKI (Hak Kekayaan Intelektual), publikasi ilmiah di jurnal yang bereputasi nasional dan/atau internasional, teknologi tepat guna yang telah diterapkan oleh masyarakat, serta buku ajar," jelas Bambang.

Dana bantuan program-program diatas bisa diperoleh dengan mengajukan proposal sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di tiap program. Poposal yang sudah mendapat persetujuan Dekan kemudian akan



Sosialisasi P2M bagi dosen FISIP

diproses kelayakannya oleh pihak DP2M-Dikti. Adapun kriteria yang digunakan untuk menentukan layak tidaknya suatu proposal memperoleh dana bantuan meliputi dua aspek. "Pertama, aspek substantif keilmuan. Kedua, aspek pendanaan atau anggaran penelitian yang diajukan," jelas Bambang.

Menurut Bambang, tiap proposal nantinya akan diteliti oleh 2-3 orang *reviewer*. *Reviewer* ini juga tidak diperbolehkan ikut serta sebagai tim dalam kegiatan penelitian supaya proses penilaian proposal lebih objektif. "Menjadi seorang *reviewer* pun tidak mudah karena harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain bergelar doktor dan berpengalaman di bidang penelitian," tambah Bambang. Dengan demikian, proposal yang lolos uji kelayakan dan berhak memperoleh dana bantuan dari program-program DP2M diharapkan mampu menunjukkan hasil bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. (int/rfa)



Suasana pertemuan Dharma Wanita FISIP

Ruang A.205 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair) tak lengang seperti biasanya. Dari ruangan tersebut, terdengar keriuhan khas ibu-ibu. Tak hanya duduk sambil berbincang, tetapi ada pula yang sibuk mencatat dan menerima sejumlah uang. Pemandangan itulah yang lazim terlihat bila pertemuan Dharma Wanita FISIP berlangsung.

Kegiatan yang diadakan pada tanggal 13 Maret 2009 tersebut diawali dengan sambutan oleh Yuliana Aan Adianti selaku Ketua Dharma Wanita FISIP. Acara pun dilanjutkan dengan pembacaan agenda bulan ini serta bulan mendatang. Pada pertemuan kali ini, para anggota diberi keterampilan mendaur ulang sampah plastik atau bekas kemasan

Pertemuan Dharma Wanita FISIP Ajang Silaturahmi dan Tukar Informasi

produk untuk dijadikan barang-barang yang lebih berguna. Seperti tas, bunga plastik, atau vas bunga. "Tiap tahun setidaknya kami merencanakan tiga *event*. Salah satunya pemberian keterampilan daur ulang," ucap perempuan yang juga istri Dekan FISIP Drs. I. Basis Susilo, MA ini.

Pertemuan rutin ini kebanyakan dihadiri para dosen baik yang masih aktif maupun nonaktif, istri dosen, serta karyawan FISIP. "Namun, kami tidak menutup kemungkinan bagi bapak-bapak bila ingin aktif di Dharma Wanita," kata Yuliana. Hari Jumat di minggu kedua tiap bulan pun dipilih sebagai hari tetap pertemuan rutin Dharma Wanita.

Tidak jauh berbeda dengan organisasi-organisasi pada umumnya, pertemuan rutin Dharma Wanita FISIP juga memiliki susunan pengurus tetap. Para pengurus dipilih secara kekeluargaan dan menjabat selama tiga tahun. "Kebanyakan pengurusnya karyawan FISIP. Soalnya kalau dosen kan sibuk, kegiatannya banyak," kata Yuliana. Setiap tahun, pengurus menyusun program kegiatan apa saja yang akan dilakukan. Program tersebut bi-

asanya dibuat dimulai dari bulan Mei, sesuai dengan bulan awal masa jabatan Dekan.

Menurut Yuliana, ada tiga program yang dimiliki Dharma Wanita FISIP, sosial, pendidikan, dan ekonomi. Program sosial Dharma Wanita FISIP meliputi kunjungan ke panti asuhan yang diadakan setahun sekali. Untuk program pendidikan, Dharma Wanita FISIP sering mengadakan acara-acara penyuluhan kesehatan atau pemberian keterampilan. Sedangkan program ekonomi meliputi arisan, iuran (sosial dan anggota), simpan pinjam (wajib dan sukarela), serta bagi-bagi SHU (Sisa Hasil Usaha). "Mulai tahun ini, arisan Rp 25.000/orang, iuran sosial, dan anggota masing-masing Rp 1000/orang," terang Yuliana.

Melalui pertemuan rutin ini diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi dan kekeluargaan, khususnya diantara para anggota Dharma Wanita FISIP. Selain itu, berbagai macam informasi dan keterampilan yang didapat selama mengikuti kegiatan di Dharma Wanita hendaknya dapat disebarluaskan setidaknya ke lingkungan keluarga dan lingkungan tempat tinggal masing-masing anggota. (int/rfa)

Internet dan Kampanye Politik

Tak lama lagi pesta demokrasi di Indonesia akan segera dimulai. Partai-partai politik (parpol) dan para calon legislatif (caleg) berlomba menggelar berbagai bentuk kampanye demi mendulang suara pada pemilu mendatang. Saluran kampanye yang digunakan pun beragam. Mulai dari konvoi-konvoi di jalanan, memasang iklan di media massa (cetak dan elektronik) hingga berkampanye lewat media *online* yaitu melalui blog dan jejaring sosial seperti *Facebook* dan *Friendster*.

Kini, para parpol dan caleg memang kerap menggunakan media *online* untuk mendekati para calon pemilih. Utamanya melalui *Facebook*, yang memang sedang menjadi trend di dunia, termasuk di Indonesia. Terlebih, beberapa waktu lalu, Obama sukses meraup banyak suara di Pemilu Amerika Serikat (AS) setelah berkampanye lewat *Facebook*.

Fenomena kesuksesan Obama itulah yang kini coba diterapkan oleh sejumlah parpol dan caleg di Indonesia. Untuk mengkritisi fenomena tersebut, pada 18 Maret lalu dilakukan Diskusi Internet dan Kampanye Politik. Bertempat di Gedung C Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair), diskusi ini menghadirkan empat pembicara. Keempat pembicara tersebut adalah Paul Belmont (Konsulat Jenderal AS), Edward Dewaruci (Anggota KPUD Kota Surabaya), Yuyun W.I (Dosen Komunikasi FISIP Unair) dan Tim Survey Himpunan Mahasiswa Komunikasi Unair.

Dalam diskusi yang terbuka untuk umum ini, para pembicara memaparkan pandangan mereka tentang sejauh mana keberadaan internet mampu mensukseskan sebuah kampanye politik. Salah satunya adalah Edward Dewaruci yang menjelaskan tentang internet dan kampanye politik.

Kampanye Pemilu, menurut Edward, merupakan kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta Pemilu termasuk mengajak memilih seseorang atau partai tertentu. "Kampanye juga memiliki dasar-dasar hukum yang jelas, yakni Undang-Undang (UU) No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD, UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan KPU No. 19 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu DPR, DPD, dan DPRD," terangnya.

Selain UU yang mengatur jalannya kampanye, terdapat pula aturan mengenai materi serta metode dalam berkam-



Paul Belmont (Konjen AS) saat jadi pembicara diskusi di gedung C

panye. Materi kampanye meliputi agenda kebijakan yang akan diperjuangkan dan strategi untuk mewujudkannya. "Sedangkan untuk metode berkampanye, ada empat hal yang perlu diperhatikan, yaitu sopan, tertib, mendidik, dan bijak serta beradab," kata Edward.

Menurut Edward, yang dimaksud sopan dalam berkampanye yakni menggunakan bahasa yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum. Kedua, kampanye harus dilaksanakan tanpa mengganggu kepentingan umum. Selain itu, idealnya, kampanye bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Para parpol dan caleg diharapkan juga mampu bersikap bijak dan be-

radab. "Jangan menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau peserta Pemilu lain," jelas Edward.

Sebagai saluran untuk berkampanye, *Facebook* tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangan. "Kelebihan *Facebook* sifatnya yang personal dan akrab," ucap Edward. Sedangkan kekurangannya yakni masih minimnya penggunaan internet atau komputer, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, dan sarana prasarana yang sulit didapat. "Tapi, kelemahan utama dari *Facebook* sebagai media kampanye adalah sulitnya memberikan sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran," tambahnya. (int/rfa)

Siswa SMA Jadi Trainer Pemilu

MINGGU, 22 Maret 2009 lalu Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga (Unair) mengadakan acara yang bertajuk *Training for Trainer the Youth Voters*. Sebanyak 80 pengurus OSIS yang mewakili 45 SMA hadir dalam acara yang diadakan oleh divisi kebijakan publik tersebut.

Melalui acara ini, nantinya peserta training diharapkan mampu menjadi agen sosialisasi Pemilihan Umum (Pemilu) kepada teman-temannya. Terlebih, tata cara Pemilu kali ini cukup berbeda. Jika pada tahun-tahun sebelumnya dilakukan dengan mencoblos, tahun ini proses Pemilu dilakukan dengan mencontreng.

Kegiatan yang diadakan di Gedung C Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) ini menghadirkan 3 narasumber.

Pertama Arief Budiman, anggota KPU provinsi Jawa Timur. Kedua, Nurul Amalia, anggota KPU kota Surabaya. Selain itu, Rahmah Ida, dosen di Departemen Komunikasi FISIP Unair juga turut menjadi pembicara.

Sejak pukul 8 pagi hingga 4 sore, para siswa yang menjadi peserta acara ini mendapat berbagai informasi seputar pemilu. Menurut Rahmah Ida, pencontrengan partai politik dapat dianalogikan sebagai proses penentuan calon pacar. "Jadi jangan sembarangan," ungkapnyanya.

Tidak hanya materi yang berupa materi, peserta juga diajak untuk melakukan simulasi pencontrengan. Juga, melakukan *forum group discussion* (FGD) mengenai peran konkret pelajar dalam Pemilu. (deb/rfa)

Perempuan Indonesia Harus Cerdas dan Mandiri

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair) telah melahirkan sejumlah tokoh yang berkiprah di level nasional. Salah satunya adalah Pinky Saptandari. Dosen Departemen Antropologi ini kini tengah menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Menyambut peringatan Hari Kartini 21 April 2009 mendatang, Jendela mewawancarai Pinky terkait kiprahnya dalam memberdayakan perempuan Indonesia. Berikut adalah wawancara eksklusif dengan Pinky.

Jendela (J) : Selain menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, apa kesibukan Anda saat ini?

Pinky (P) : Saat ini saya sedang melakukan penelitian tentang gender, seksualitas, dan kesehatan reproduksi dari perspektif antropologi, filsafat dan feminisme.

(J) : Apa tujuan Anda dalam meneliti masalah tersebut?

(P) : Tujuan saya melakukan penelitian ini yakni menggali akar permasalahan dan mendekonstruksi diskursus tubuh medis dalam kesehatan reproduksi perempuan.

(J) : Apa pengalaman menarik yang pernah Anda alami selama menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan?

(P) : Ketika harus mewakili menteri kunjungan kerja ke daerah, di mana akses perempuan untuk mendapat informasi dan layanan sangat minim, seperti daerah Papua, NTT, NTB, Aceh. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa betapa banyak perempuan Indonesia yang masih belum berdaya, belum terpenuhi hak-hak dasar mereka seperti hak kesehatan reproduksi dan hak politik.

(J) : Program pemberdayaan perempuan yang seperti apa yang Anda prioritaskan?

(P) : Program yang kami prioritaskan adalah mendorong perubahan pola pikir pada masyarakat dan pembuat kebijakan agar pola pikir yang bias gender dapat diubah menjadi responsif gender. Misalnya dalam upaya menurunkan angka kematian ibu, tidak akan berhasil bila kebijakan pemerintah maupun pola pengambilan keputusan keluarga didominasi budaya patriarki.

(J) : Sepengetahuan Anda, bagaimanakah kondisi perempuan Indonesia saat ini?

(P) : Sebagian sudah berdaya dan mandiri. Namun, masih lebih banyak yang belum berdaya dan mandiri. Hal tersebut ditandai dengan masih tingginya angka buta aksara, angka kematian ibu, angka kekerasan dalam rumah tangga, serta rendahnya partisipasi politik perempuan.

(J) : Apakah makna Hari Kartini menurut pandangan Anda?

(P) : Makna Hari Kartini menurut saya yakni suatu momentum untuk mengkritisi kondisi perempuan Indonesia dari masa ke masa. Apakah sudah ada perbaikan? Dalam hal apa saja? Apa yang harus ditingkatkan? Dan seterusnya. Sampai hari ini angka kematian ibu melahirkan (AKI) masih tinggi. Ingat bahwa Ibu Kartini meninggal setelah melahirkan. Artinya, pemerintah & masyarakat masih harus terus bekerja keras untuk mengatasi tingginya AKI.

(J) : Apakah harapan Anda bagi perempuan dan masyarakat Indonesia?

(P) : Perempuan Indonesia harus cerdas dan mandiri untuk dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Hal ini akan berdampak positif bagi kualitas generasi penerus bangsa



Nama : Pinky Saptandari
 Terlahir : Surabaya, 26 Mei 1958
 Pendidikan Terakhir :
 Magister Antropologi
 Program Pascasarjana UI
 1994

maupun kesejahteraan masyarakat. Masyarakat harus membangun kepedulian bersama bahwa upaya pemberdayaan perempuan adalah urusan bersama, masyarakat dan pemerintah. Pendidikan dan kesehatan bagi perempuan harus menjadi prioritas bila ingin membuat perubahan yang berarti dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bangsa Indonesia. Untuk itu, anggaran pembangunan harus benar-benar difokuskan untuk pembangunan manusia, khususnya pembangunan manusia secara responsif gender. Artinya, bahwa anggaran pembangunan memperhatikan kebutuhan laki-laki maupun perempuan. **(deb/rfa)**

Communication Expo & Award Penghargaan Bagi Karya Mahasiswa

SELAMA dua hari, yaitu 10 dan 11 Maret 2009, sejumlah poster memenuhi sepanjang lorong gedung A Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair). Berbagai poster yang dipamerkan tersebut merupakan karya mahasiswa Departemen Komunikasi yang dipamerkan untuk meramaikan serangkaian acara bertajuk *Communication Expo & Award*. Kegiatan pameran menampilkan karya mahasiswa yang mengambil mata kuliah Desain Grafis, Fotografi, dan Manajemen Periklanan (Manper).

Tidak hanya dalam bentuk visual, di hari yang sama, ada beberapa karya yang disajikan dalam bentuk audio dan audio visual. Yakni, karya dari mahasiswa kelas Radio dan kelas TMMB (Teknik Mencarai dan Menulis Berita). Untuk kelas Radio, karya audio mahasiswa diperdengarkan lewat internal audio. Sedangkan untuk karya audio visual

dari mata kuliah TMMB serta Manper ditayangkan di mini teater.

Bentuk apresiasi tidak cukup hanya lewat pameran saja. Oleh karena itu, diadakan pula pemberian penghargaan bagi karya terbaik mahasiswa dalam *Communication Award* yang diadakan 12 maret. Bertempat di Auditorium Gedung C, *Communication Award* dibuka dengan penampilan dari band akustik, *D'long of*.

Selanjutnya, dilakukan pembacaan nominasi karya terbaik dan penyerahan sertifikat. Penghargaan diberikan oleh para alumni Komunikasi yang sukses di bidangnya. Salah satunya Amanda Manuputty, reporter Metro TV, yang memberikan penghargaan untuk karya terbaik dari mahasiswa kelas TMMB. Selain itu, ada juga Danang Saputro dari Apply Channes dan Vika Wisnu dari Radio Colours. Sedangkan *award* untuk karya terbaik dari kelas Manper dan Fotografi, ma-

sing-masing diserahkan oleh Samanandito dari TV lokal Bali dan Rizky Setia Bhakti.

Salah satu karya yang menyabet penghargaan yaitu poster dan iklan audio visual milik Sheila, mahasiswa Departemen Komunikasi angkatan 2006. Berbeda dengan karya lain yang sama-sama memuat tema korupsi, tema korupsi yang diangkat sama sekali tidak berkaitan dengan dunia pemerintah. Malah, dikaitkan dengan kehidupan mahasiswa.

"Poster milik kami ini berusaha menggambarkan adanya korupsi nilai. Salah seorang anggota tidak mengerjakan tugas, tapi mendapat nilai yang sama," tutur Sheila.

Menurut Ketua Panitia, Ajeng, kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini, tidak hanya ditujukan bagi para sivitas FISIP saja, tapi juga untuk masyarakat luas. Juga diundang SMA 19 dan SMA 10, untuk mengenalkan Departemen Komunikasi pada masyarakat luas. Walaupun acara ini hanya dipersiapkan 1,5 bulan tapi Ajeng dan teman-teman panitia menyatakan puas dengan hasil yang telah dicapai. **(deb/rfa)**